

# JAWABAN DAN PEMBAHASAN SOAL

1. Pada perjanjian Linggarjati, setelah mengalami tekanan berat dari dunia Internasional terutama Inggris, maka dicapailah suatu persetujuan pada tanggal . . . .

a. 15 November 1946

b. 15 Desember 1945

c. 5 November 1946

d. 10 November 1946

e. 15 Desember 1946

Penjelasan:

Perjanjian Linggarjati dilatarbelakangi oleh masuknya AFNEI yang diboncengi NICA ke Indonesia. Hal ini karena Jepang menetapkan 'status quo' di Indonesia yang menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda seperti peristiwa 10 November di Surabaya. Pemerintah Inggris selaku penanggungjawab juga telah berupaya menyelesaikan konflik politik dan militer di Asia. Pada akhirnya diplomat Inggris yang bernama Sir Archibald Clark Kerr mengundang Indonesia dan Belanda untuk dapat melakukan



perundingan di Hooge Veluwe. Perundingan awal antara Indonesia dan Belanda di Hooge Veluwe tidak membawa hasil yang baik bagi Indonesia. Delegasi RI mengadakan pertemuan 4 kali dengan delegasi Belanda pimpinan PM Schermerhorn antara tanggal 14-24 April. Perundingan itu berakhir dengan kegagalan, karena Belanda hanya mau memenuhi tuntutan RI berupa pengakuan. Perjanjian bersejarah antara Indonesia dan Belanda ini akhirnya terlaksana juga. Perjanjian Linggarjati ini dilaksanakan dimulai pada tanggal 11 November 1946 sampai 15 November 1946. Tempat pelaksanaan perjanjian atau perundingan ini bertempat di Linggarjati, Cirebon. Perundingan yang dihadiri oleh delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Sutan Syahrir dan delegasi Belanda dipimpin oleh Prof. Schermerhorn. Perundingan yang oleh diplomat Inggris bernama Lord Killearn ini memuat 17 pasal dan diberi nama Naskah Persetujuan Linggarjati.

2. Isi Perjanjian Linggarjati sangat merugikan pihak Indonesia sebab . . . .

a. **Mempersempit wilayah RI dan mengubah tujuan negara**



- b. Mempersempit wilayah RIS dan mengubah tujuan negara
- c. Mempersempit wilayah NIS dan mengubah tujuan negara
- d. Mempersempit wilayah NIT dan mengubah tujuan negara
- e. Mempersempit wilayah DIY dan mengubah tujuan negara

Penjelasan:

Pokok-pokok hasil dari perjanjian Linggarjati adalah:

- 1) Wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura merupakan wilayah kekuasaan Indonesia yang telah diakui Belanda secara de facto dan harus segera ditinggalkan paling lambat pada tanggal 1 Januari 1949.
- 2) Sebelum tanggal 1 Januari 1949 akan dibentuk sebuah Republik Indonesia Serikat (RIS) atas kerjasama Republik Indonesia dan Belanda.
- 3) Ratu Belanda akan menjadi ketua Uni Indonesia-Belanda atas bentukan Republik Indonesia Serikat dan Belanda.



3. Salah satu isi negosiasi Linggarjati yaitu Belanda yang mengakui secara de facto RI dengan wilayah kekuasaan yang meliputi . . . .

- a. Bali, NTB, dan NTT
- b. Sumatra, Kalimantan, dan Jawa
- c. Jawa Barat, Jawa Timur, dan Bali
- d. Sulawesi, Lampung, dan Jambi
- e. Sumatera, Jawa, dan Madura

Penjelasan:

Hasil perundingan tersebut menghasilkan 17 pasal yang antara lain berisi:

- 1) Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura.
- 2) Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949.
- 3) Pihak Belanda dan Indonesia Sepakat membentuk negara RIS.
- 4) Dalam bentuk RIS Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth/Persemakmuran Indonesia-Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala uni.



4. Salah satu isi dari perjanjian Renville adalah . . . .
- a. Belanda mengakui seluruh wilayah Hindia Belanda
  - b. Belanda mengakui de jure Indonesia
  - c. Belanda tidak mengakui Jawa, Sumatra, Jogja
  - d. Disetujuinya garis demarkasi
  - e. Indonesia tidak menarik mundur pasukan TNI di Jabar dan Jatim

Penjelasan:

Pokok-pokok isi perjanjian Renville yaitu:

- 1) Pembentukan Republik Indonesia Serikat dengan segera.
- 2) Republik Indonesia merupakan negara bagian dalam RIS.
- 3) Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia sebelum RIS terbentuk.
- 4) Wilayah Indonesia yang diakui Belanda hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera.
- 5) Wilayah kekuasaan Indonesia dengan Belanda dipisahkan oleh garis demarkasi yang disebut Garis Van Mook.



- 6) Tentara Indonesia ditarik mundur dari daerah-daerah kekuasaan Belanda (Jawa Barat dan Jawa Timur).
- 7) Akan dibentuk Uni Indonesia-Belanda dengan kepalanya Raja Belanda.
- 8) Akan diadakan plebisit atau semacam referendum (pemungutan suara) untuk menentukan nasib wilayah dalam RIS.
- 9) Akan diadakan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante RIS

5. Mengapa Perjanjian Renville tidak lebih baik daripada perundingan Linggarjati?

- a. Kedua belah pihak menuduh masing-masing melanggar perdamaian
- b. Linggarjati lebih memprioritaskan ego
- c. Linggarjati menepati perjanjian
- d. Renville lebih menepati perdamaiannya
- e. Renville mendirikan blokade

Penjelasan:

Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 18 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di



atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perjanjian ini berisi batas antara wilayah Indonesia dengan Belanda yang disebut Garis Van Mook. Seiring perjalanan waktu, perjanjian Renville mengalami kegagalan yang disebabkan oleh pengakhiran secara sepihak oleh Belanda, karena Belanda menuduh Republik Indonesia tidak serius dalam melaksanakan isi perjanjian Renville. Dalih perjanjian Renville sudah tidak dapat diteruskan karena pelanggaran dari pihak Indonesia, maka Belanda kembali melancarkan serangan militer kepada pihak Indonesia.

6. Delegasi Belanda dipimpin oleh Abdul Kadir Widjojoatmodjo adalah saat perundingan . . . .

- a. Linggarjati
- b. Renville**
- c. Roem-Royen
- d. KMB
- e. Konferensi Antar-Indonesia

Penjelasan:



Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 18 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Delegasi Indonesia dipimpin Perdana Menteri Amir Syarifuddin Harahap. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh Kolonel KNIL R. Abdul Kadir Wijoyoatmojo. Delegasi Amerika Serikat dipimpin oleh Frank Porter Graham.

7. Didalam perundingan Renville, atas usulan Amerika Serikat yaitu terdapat 3 negara yang siap mejadi moderator perselisihan Belanda-Indonesia . . . .

- a. Belanda, Indonesia, AS
- b. AS, Rusia, Inggris
- c. Australia, Belgia, As
- d. As, Indonesia, Israel
- e. Belanda, Luxemburg, Vatikan

Penjelasan:

Perundingan Renville dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi Tiga



Negara (KTN) yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Perjanjian ini diadakan untuk menyelesaikan perselisihan atas Perjanjian Linggarjati tahun 1946.

8. Pada 21 Juli 1947, Belanda melakukan serangan militer yang disebut sebagai . . . .

- a. Agresi Militer Belanda II
- b. Agresi militer sekutu I
- c. Agresi Militer Belanda I
- d. Agresi Federasi Hindia Belanda I
- e. Pemberontakan Permesta

Penjelasan:

Perjanjian resmi pertama yang dilakukan Belanda dan Indonesia setelah kemerdekaan adalah Perundingan Linggarjati. Van Mook bertindak langsung sebagai wakil Belanda, sedangkan Indonesia mengutus Soetan Sjahrir, Mohammad Roem, Susanto Tirtoprojo, dan A.K. Gani. Inggris sebagai pihak penengah diwakili oleh Lord Killearn. Namun, realisasi di lapangan tidak sepenuhnya berjalan mulus hingga Pada tanggal 15 Juli 1947, van Mook mengeluarkan ultimatum supaya RI



menarik mundur pasukan sejauh 10 km dari garis demarkasi. Pimpinan RI menolak permintaan Belanda tersebut. Pada tanggal 20 Juli 1947, van Mook menyatakan melalui siaran radio bahwa Belanda tidak terikat lagi pada hasil Perundingan Linggarjati dan kurang dari 24 jam setelah itu terjadilah Agresi Militer Belanda I. Tujuan utama agresi Belanda adalah merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam, terutama minyak.

9. Pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda melakukan Agresi Militer I terhadap Indonesia. Pengaruh positif dari Agresi Militer I bagi Indonesia adalah . . . .

- a. Indonesia mendapat dukungan dari dunia Internasional
- b. Indonesia berhasil mengungguli kekuatan Belanda
- c. Belanda mendapat peringatan keras dari Dewan Keamanan Belanda
- d. Belanda terpaksa menghentikan aksi militernya
- e. Bangsa Indonesia mendapat bantuan dari India

Penjelasan:



Pemerintah Republik Indonesia secara resmi mengadukan agresi militer yang dilakukan oleh Belanda ke PBB, karena agresi militer tersebut dinilai telah melanggar suatu perjanjian Internasional, yaitu Persetujuan Linggarjati. Belanda ternyata tidak memperhitungkan reaksi keras dari dunia internasional, termasuk Inggris, yang tidak lagi menyetujui penyelesaian secara militer. Atas permintaan India dan Australia pada 31 Juli 1947, masalah agresi militer yang dilancarkan Belanda dimasukkan ke dalam agenda Dewan Keamanan PBB. PBB langsung merespons dengan mengeluarkan resolusi tertanggal 1 Agustus 1947 yang isinya menyerukan agar konflik bersenjata dihentikan. PBB mengakui eksistensi RI dengan menyebut nama “Indonesia”, bukan “Netherlands Indies” atau “Hindia Belanda” dalam setiap keputusan resminya.

10. Tugas pokok dari Komisi Tiga Negara adalah . . . .

- a. Mencegah terjadinya Agresi Militer Belanda I
- b. Mencegah terjadinya Agresi Militer Belanda II
- c. Melaksanakan Perjanjian Roem-Royen



d. Membantu penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Belanda

e. Mewakili Dewan Keamanan PBB

Penjelasan:

Tugas pokok dari KTN adalah:

- 1) Menjadi penengah konflik antara Indonesia dan Belanda.
- 2) Memasang patok-patok wilayah status quo dengan dibantu TNI.
- 3) Mempertemukan Indonesia dengan Belanda dalam perundingan Renville.
- 4) Menghentikan aksi tembak menembak antara Indonesia dan Belanda.

11. Agresi Militer Belanda II terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap kota . . . .

- a. Surabaya
- b. Yogyakarta
- c. Jakarta
- d. Solo
- e. Semarang



Penjelasan:

Agresi Militer Belanda II atau Operasi Gagak merupakan peristiwa penyerbuan secara militer yang dilakukan oleh pasukan militer Belanda terhadap wilayah Republik Indonesia. Agresi Militer Belanda II terjadi pada 19 Desember 1948. Peristiwa ini diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir, dan beberapa tokoh lainnya.

12. Pada 1 Maret 1949 Brigade X mengadakan serangan umum ke Yogyakarta dipimpin oleh . . . .

a. Letkol Soeharto

b. Jenderal Soedirman

c. Kolonel Isdiman

d. Bung Tomo

e. Letkol Sarbini

Penjelasan:

Serangan umum dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1949 saat pagi hari secara besar-besaran dan serentak di seluruh wilayah Divisi III/GM III. Fokus serangan adalah Ibu kota Republik, yaitu Yogyakarta.



Letkol Soeharto langsung memimpin pasukan dari sektor barat sampai ke batas Malioboro. Sektor Timur dipimpin Ventje Sumual, sektor selatan dan timur dipimpin Mayor Sardjono, sektor utara oleh Mayor Kusno. Sedangkan untuk sektor kota sendiri ditunjuk Letnan Amir Murtono dan Letnan Masduki sebagai pimpinan

13. Dalam Serangan Umum 1 Maret Tentara Republik Indonesia berhasil menduduki Kota Yogyakarta selama . . . .

- a. 5 jam
- b. 6 jam**
- c. 7 jam
- d. 8 jam
- e. 9 jam

Penjelasan:

Serangan umum dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1949 saat pagi hari secara besar-besaran dan serentak di seluruh wilayah Divisi III/GM III. Fokus serangan adalah Ibu kota Republik, yaitu Yogyakarta. Namun di saat bersamaan juga menyerang kota-kota



besar lainnya seperti Magelang dan Solo agar Belanda tidak mengirim pasukan bantuan ke Yogyakarta. TNI berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam.

Tepat pukul 12.00 sianginya sebagaimana yang telah ditentukan semula, seluruh pasukan TNI mundur.

14. Dampak dari Serangan Umum 1 Maret 1949 yang menunjang perjuangan bangsa Indonesia dalam bidang diplomasi adalah . . . .

- a. Dapat dikuasainya kota Jogja selama 6 jam
- b. Dibawanya masalah Indonesia ke dalam forum PBB
- c. Menunjukkan bahwa TNI masih ada dan terorganisir dengan baik
- d. Indonesia mendapatkan pengakuan Internasional sebagai Negara yang berdaulat
- e. Terjadinya gejolak di dalam wilayah RI

Penjelasan:

Akibat agresi militer Belanda II ke Yogyakarta, dunia Internasional termasuk Amerika Serikat mengancam akan menghentikan bantuan mereka kepada Belanda, melakukan tekanan dan memaksa Belanda untuk



mengadakan perundingan kembali dengan Indonesia. Akibat tekanan dari Dunia Internasional dan kelelahan dalam melawan kegiatan gerilya militer yang dilakukan TNI, Belanda akhirnya bersedia untuk melakukan perundingan dengan Republik Indonesia, dan pada tanggal 14 April, Belanda dan Indonesia melakukan perundingan damai di Jakarta untuk menyelesaikan beberapa persoalan mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag pada tahun yang sama.

15. Peristiwa penangkapan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta oleh Belanda yang selanjutnya diasingkan ke Prapat dan Muntok terjadi pada saat . . . .

- a. Perundingan Renville
- b. Perjanjian Roem-Royen
- c. Serangan Umum terhadap kota Yogyakarta
- d. Agresi Militer Belanda I
- e. Agresi Militer Belanda II

Penjelasan:



Agresi Militer Belanda II terjadi pada 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta serta penangkapan Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatra. Pengasingan Presiden Soekarno dan rekan-rekannya terjadi tanggal 22 Desember 1948 dengan dikomandoi oleh Kolonel D. R. A. van Langen untuk dibawa ke Pelabuhan Udara Yogyakarta dan selanjutnya diterbangkan tanpa tujuan yang diketahui. Setelah mendarat di Pelabuhan Udara Kampung Dul Pangkal Pinang barulah para pemimpin republik mengetahui bahwa mereka diasingkan ke Pulau Bangka, akan tetapi rombongan Presiden Soekarno, Sutan Sjahrir, dan Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim berlanjut diterbangkan lagi menuju Medan dan ke Brastagi serta Parapat, sementara Drs. Moh. Hatta, Soerjadarma, Mr. Assaat, dan Mr. Pringgodigdo dibawa ke Bukit Menumbing Mentok dengan dikawal truk bermuatan tentara Belanda.



16. Keinginan Belanda untuk menghancurkan eksistensi Republik Indonesia melalui Agresi Militer II mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut terjadi karena . . . .

- a. Prancis menarik dukungan terhadap Belanda dalam forum PBB
- b. PBB menerjunkan pasukan Sekutu di wilayah Indonesia yang dikuasai Belanda
- c. Diplomat Indonesia membawa kasus serangan Belanda di Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan PBB
- d. PBB membentuk UNCI untuk menggantikan Komisi Tiga Negara
- e. Presiden Soekarno sudah memerintahkan pembentukan PDRI di Bukit Tinggi

Penjelasan:

Tidak lama setelah ibu kota RI di Yogyakarta dikuasai oleh Belanda dalam Agresi Militer Belanda II, mereka berulang kali menyiarkan berita bahwa RI sudah bubar. Para pemimpinnya seperti Soekarno, Hatta, dan Syahrir sudah menyerah dan sedang ditahan. Tentara Belanda memang telah menduduki ibu kota Yogyakarta dan menangkap sebagian besar pimpinan Pemerintahan



Republik Indonesia, maka lewat radiogram ditulislah sebuah perintah oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta agar Menteri Kemakmuran Sjafruddin Prawiranegara yang tengah berada di Bukittinggi untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia.

17. Alasan utama dari pembentukan PDRI yang berkedudukan di Bukittinggi Sumbar adalah . . . .

- a. Menyelamatkan kabinet yang memerintah saat itu
- b. Sebagai pemerintahan bayangan karena para pemimpin Indonesia diasingkan oleh Belanda
- c. Mengelabui Belanda agar tidak menyerang pusat pemerintahan di Yogyakarta
- d. Yogyakarta dinilai tidak lagi aman menjadi pusat pemerintahan Indonesia
- e. Mengisyaratkan bahwa basis pertahanan militer adalah Bukittinggi

Penjelasan:

Alasan utama dan pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang berkedudukan di Bukittinggi, Sumatera Barat adalah sebagai



pemerintahan bayangan karena pemimpin Indonesia sedang diasingkan oleh pihak Belanda. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) didirikan karena keadaan darurat akibat serangan Belanda dalam Agresi Militer II. Pemerintahan ini dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Kesejahteraan.

18. Salah satu hasil keputusan dari KMB adalah diakuinya kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS). Tidak sampai berumur satu tahun, RIS dibubarkan dan beralih menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembubaran RIS dilakukan karena . . . .

- a. Republik Indonesia di Yogyakarta melakukan ekspansi politik ke negara-negara bagian RIS
- b. Negara-negara bagian RIS tidak mampu mengelola pemerintahan dengan baik
- c. Belanda mencampuri urusan pemerintahan dalam negeri RIS
- d. Negara-negara bagian RIS memilih bergabung dengan Republik Indonesia
- e. Belanda membatalkan hasil Konferensi Meja Bundar



Penjelasan:

Pada tanggal 17 Agustus 1950 Republik Indonesia Serikat dibubarkan. Pembubaran RIS dilatarbelakangi oleh ketidakselarasan antara tujuan proklamasi dengan tujuan pembentukan RIS. Republik Indonesia Serikat merupakan salah satu hasil kesepakatan dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag, yang menjadikan Indonesia terbagi secara wilayah dan pemerintahan dalam negara-negara kecil diantaranya seperti negara Sumatra Timur, negara Sumatra Selatan, negara Pasundan, dan negara Indonesia Timur. Walaupun Indonesia telah memproklamkan kemerdekaannya, namun, Belanda tidak mau begitu saja menyerahkan kemerdekaan secara penuh ke Indonesia. Di sisi lain, pemberontakan rakyat Indonesia yang membuat Belanda kewalahan menyebabkan ide pembentukan RIS yang dirasa mampu memecah belah persatuan rakyat RIS pada masa itu. Kenyataannya memang banyak sekali permasalahan dalam RIS sendiri yang tergolong negara baru, hingga muncul banyak pemberontakan, seperti pemberontakan Andi Aziz dan DI/TII Kartosuwiryo. Hingga pada akhirnya adanya inisiatif



dari negara Indonesia Timur dan Sumatera Timur meminta untuk pembubaran RIS dan dikembalikan menjadi NKRI seperti semula, sehingga pemerintahan tidak terpisah-pisah sehingga merusak persatuan NKRI. Keinginan ini akhirnya terwujud dengan dibuatnya UUD tahun 1950 yang memiliki unsur-unsur dalam UUD 1945, sekaligus resmi membubarkan RIS dan membentuk kembali NKRI.

19. Ketentuan mengenai Irian Barat menurut Konferensi Meja Bundar (KMB) adalah . . . .

- a. Diserahkan kepada Dewan Keamanan PBB
- b. Diserahkan kepada Indonesia dalam waktu dekat
- c. Dibentuk pemerintahan transisi dari Belanda kepada RIS
- d. Diserahkan kepada pemerintahan Indonesia untuk mengelola daerah Irian Barat
- e. Diadakan perundingan lanjutan dalam waktu satu tahun setelah penyerahan kedaulatan

Penjelasan:

Masalah status Irian Barat menjadi bahan perdebatan selama KMB berlangsung. Dalam hal ini, delegasi



Indonesia berpendapat bahwa Indonesia harus meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda. Di lain pihak, Belanda menolak karena mengklaim bahwa Irian Barat tidak memiliki ikatan etnik dengan wilayah Indonesia lainnya. Meskipun opini publik Belanda yang mendukung penyerahan Irian Barat kepada Indonesia, kabinet Belanda khawatir tidak akan dapat meratifikasi perjanjian dalam KMB jika poin ini disepakati. Pada awal 1 November 1949 kesepakatanpun diperoleh di mana status Irian Barat akan ditentukan melalui perundingan antara Republik Indonesia Serikat dengan Belanda dalam waktu satu tahun setelah penyerahan kedaulatan. Kemudian pada tanggal 27 Desember 1949, hal-hal yang mengenai Irian Barat yang menjadi bahan perdebatan selama KMB menghasilkan keputusan bahwa:

“Serah terima kedaulatan atas wilayah Hindia Belanda dari pemerintah kolonial Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, kecuali Irian Barat. Indonesia ingin agar semua bekas daerah Hindia Belanda menjadi daerah Indonesia, sedangkan Belanda ingin menjadikan Irian Barat sebagai negara terpisah karena perbedaan etnis.”



Pada akhirnya, KMB ditutup tanpa keputusan jelas mengenai status Irian Barat. Karena itu, pada pasal 2 menyebutkan bahwa Irian Barat bukan bagian dari serah terima, dan bahwa masalah ini akan diselesaikan dalam waktu satu tahun.

20. Dibawah ini beberapa faktor yang mempengaruhi kembalinya proses RIS menjadi NKRI, kecuali?

- a. Bentuk Negara RIS bertentangan dengan cita cita proklamasi kemerdekaan Indonesia
- b. Pembentukan Negara RIS tidak sesuai dengan kehendak rakyat
- c. Keinginan Indonesia untuk menerapkan konstitusi RIS
- d. Banyak menimbulkan masalah yang dihadapi oleh negara bagian RIS
- e. Bentuk RIS merupakan warisan dari koloniel Belanda untuk memperlemah kekuatan bangsa Indonesia

Penjelasan:

Faktor yang mempengaruhi proses kembalinya negara RIS menjadi NKRI:



- 1) Bentuk negara RIS bertentangan dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945.
- 2) Pembentukan negara RIS tidak sesuai dengan kehendak rakyat.
- 3) Bentuk RIS pada dasarnya merupakan warisan dari kolonial Belanda yang tetap ingin berkuasa di Indonesia.
- 4) Berbagai masalah dan kendala politik, ekonomi, sosial, dan sumber daya manusia dihadapi oleh negara-negara bagian RIS.